

EVIDEN PEMBAHARUAN HUKUM

- Setelah menempuh mata kuliah ini Mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, kerangka aturan dalam hukum bisnis serta perkembangan dalam hukum bisnis berbasis digital dan syariah. Pembaharuan hukum pidana terkait kemampuan mahasiswa untuk menguasai konsep pemikirannya atau ide-ide dasarnya, hakikat pembaharuan hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, baik di dunia KUHP/KUHAP, serta contoh kasus-kasus dalam putusan pengadilan terkait perkembangan konsep hukum pidana dan pemidanaan. Mahasiswa mampu berfikir kritis, logis, sistematis, argumentative, serta solutif.

1. EVIDEN SOSIALISASI PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022



pn.bangkalan Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 10.00 Wib - Bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Bangkalan menyelenggarakan Sosialisasi Perma 6 Tahun 2022 dengan Pemateri Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Bapak Bapak Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan diikuti oleh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita, seluruh Staff, CPNS serta PPNP Pengadilan Negeri Bangkalan.

Dalam, sosialisasi terkait Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 ini mengatur tentang administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung secara elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung peradilan modern berbasis teknologi informasi, sehingga proses administrasi dan persidangan menjadi lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti: Proses pengajuan dan penerimaan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik. Pengelolaan dokumen elektronik terkait perkara. Penunjukan majelis hakim, panitera, dan penetapan hari sidang Peninjauan Kembali secara elektronik. Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju secara elektronik.

[#humasmahkamahagung](#)

[#mahkamahagung](#)

[#ditjenbadilum](#)

[#pengadilantinggisurabaya](#)

[#pengadilannegeribangkalan](#)

[#pnbangkalanlakardeih](#) lebih sedikit

2. EVIDEN RAPAT BULANAN (PEMBINAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA) – dengan detail pembahasan KUHP Nasional, PERMA No. 7 Tahun 2016 , PERMA No. 8 Tahun 2016, PERMA No. 9 Tahun 2016





Detail Masing-Masing Peraturan:

- PERMA No. 7 Tahun 2016 (Penegakan Disiplin Kerja Hakim): Mengatur sanksi dan prosedur penegakan disiplin bagi hakim yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemecatan, untuk menjaga integritas profesi hakim.
- PERMA No. 8 Tahun 2016 (Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung): Menegaskan kewajiban atasan untuk memantau, mengawasi, dan membina bawahan, baik dalam tugas maupun perilaku, untuk memastikan kinerja yang baik dan sesuai aturan.
- PERMA No. 9 Tahun 2016 (Pedoman Penanganan Pengaduan/Whistleblowing): Mengatur mekanisme bagi masyarakat, instansi lain, maupun internal pengadilan untuk menyampaikan pengaduan, termasuk melalui aplikasi SIWAS MA-RI dan platform pengaduan lainnya, untuk mencegah dan mengungkap pelanggaran. PERMA ini mengatur tata cara penerimaan, pengelolaan, hingga tindak lanjut pengaduan terkait pelanggaran kode etik, disiplin, maladministrasi, atau pengelolaan keuangan, demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Terkait salah satu perbedaan yang mendasar pada KUHP Lama dan KUHP Baru, yakni hukuman pidana dalam KUHP Lama tidak adanya hukuman kerja sosial, namun pada KUHP Nasional terdapat hukuman kerja sosial, dan masih banyak perbedaan lainnya.

Tujuan Utama Rapat Monitoring Bulanan tersebut adalah untuk:

- Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas hakim serta aparat peradilan.
- Menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan.
- Mewujudkan reformasi peradilan yang lebih bersih dan terpercaya.